



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/M-DAG/PER/10/2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 telah menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Produsen pupuk;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi oleh produsen pupuk serta dengan telah beroperasinya unit produksi I A dan I B PT. Pupuk Kujang, perlu mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44556);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/M-DAG/PER/10/2006**

Pasal 1

Mengubah wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dinyatakan tetap masih berlaku.

Pasal 3

Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini pada huruf A angka 1 nomor 12 dan 13 dan angka II nomor 1 dan 2 pelaksanaannya berlaku mulai tanggal 15 Mei 2007.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 1 Maret 2007

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI



ARDIANSYAH PARMAN

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2007
 Tanggal : 1 Maret 2007

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
A.	PUPUK UREA		
I.	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tenggara 3. Aceh Timur 4. Aceh Tengah 5. Aceh Barat 6. Aceh Besar 7. Pidie 8. Aceh Utara 9. Simeulue 10. Aceh Singkil 11. Bireuen 12. Aceh Barat Daya 13. Gayolues 14. Aceh Jaya 15. Nagan Raya 16. Aceh Tamiang 17. Bener Meriah 18. Kota Banda Aceh 19. Kota Sabang 20. Kota Lhokseumawe 21. Kota Langsa
		2. SUMATERA UTARA	1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Tapanuli Selatan 4. Nias 5. Langkat 6. Karo 7. Deli Serdang 8. Simalungun 9. Asahan 10. Labuhan Batu 11. Dairi 12. Toba Samosir 13. Mandailing Natal 14. Nias Selatan 15. Pakpak Barat 16. Humbang Hasundutan 17. Samosir 18. Serdang Bedagei 19. Kota Medan 20. Kota Pematang Siantar 21. Kota Sibolga 22. Kota Tanjung Balai 23. Kota Binjai 24. Kota Tebing Tinggi 25. Kota Padangsidempuan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		3. SUMATERA BARAT	1. Pesisir Selatan
			2. Solok
			3. Sawah Lunto/Sijunjung
			4. Tanah Datar
			5. Padang Pariaman
			6. Agam
			7. Lima Puluh Kota
			8. Pasaman
			9. Kep. Mentawai
			10. Dharmasraya
			11. Solok Selatan
			12. Pasaman Barat
			13. Kota Padang
			14. Kota Solok
			15. Kota Sawahlunto
			16. Kota Padang Panjang
			17. Kota Bukittinggi
			18. Kota Payakumbuh
			19. Kota Pariaman
		4. RIAU	1. Kampar
			2. Indragiri Hulu
			3. Bengkalis
			4. Indragiri Hilir
			5. Palalawan
			6. Rokan Hulu
			7. Rokan Hilir
			8. Siak
			9. Kuantan Sengingi
			10. Kota Pekanbaru
			11. Kota Dumai
		5. KEPULAUAN RIAU	1. Kepulauan Riau
			2. Karimun
			3. Natuna
			4. Lingga
			5. Kota Batam
			6. Kota Tanjung Pinang
		6. JAMBI	1. Kerinci
			2. Merangin
			3. Sarolangun
			4. Batang Hari
			5. Muaro Jambi
			6. Tanjung Jabung Barat
	7. Tanjung Jabung Timur		
	8. Bungo		
	9. Tebo		
	10. Kota Jambi		
7. SUMATERA SELATAN	1. Ogan Komering Ulu		
	2. Ogan Komering Ilir		
	3. Muara Enim		
	4. Lahat		
	5. Musi Rawas		
	6. Musi Banyuasin		
	7. Banyuasin		
	8. OKU Timur		
	9. OKU Selatan		

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			10. Ogan Ilir
			11. Kota Palembang
			12. Kota Pagar Alam
			13. Kota Lubuk Linggau
			14. Kota Prabumulih
		8. BANGKA BELITUNG	1. Bangka
			2. Belitung
			3. Bangka Selatan
			4. Bangka Tengah
			5. Bangka Barat
			6. Belitung Timur
			7. Kota Pangkal Pinang
		9. BENGKULU	1. Bengkulu Selatan
			2. Rejang Lebong
			3. Bengkulu Utara
			4. Kaur
			5. Seluma
			6. Muko-muko
			7. Lebong
			8. Kepahiang
			9. Kota Bengkulu
		10. LAMPUNG	1. Lampung Selatan
			2. Lampung Tengah
			3. Lampung Utara
			4. Lampung Barat
			5. Tulang Bawang
			6. Tanggamus
			7. Lampung Timur
			8. Way Kanon
			9. Kota Bandar Lampung
			10. Kota Metro
		11. DKI JAKARTA	1. Adm. Kes. Seribu
			2. Jakarta Pusat
			3. Jakarta Utara
			4. Jakarta Barat
			5. Jakarta Selatan
			6. Jakarta Timur
		12. JAWA BARAT I	1. Tasikmalaya
			2. Ciamis
			3. Kota Tasikmalaya
			4. Kota Banjar
		13. JAWA TENGAH I	1. Cilacap
			2. Banyumas
			3. Purbalingga
			4. Banjarnegara
			5. Kebumaha
			6. Purworejo
			7. Wonorejo
			8. Magelang
			9. Temanggung
			10. Batang
			11. Pekalongan
			12. Pemalang
			13. Kota Magelang
			14. Kota Peralangan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		14. D. I. JOGJAKARTA	1. Kulon Progo 2. Bantul 3. Gunung Kidul 4. Sleman 5. Kota Jogjakarta
		15. KALIMANTAN BARAT	1. Sambas 2. Pontianak 3. Sanggau 4. Kelapang 5. Sintang 6. Kapuas Hulu 7. Bangkayang 8. Landak 9. Melawi 10. Sekadau 11. Kota Pontianak 12. Kota Singkawang
		16. BANTEN	1. Pandeglang 2. Lebak 3. Tangerang 4. Serang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon
II.	PT. PUPUK KUJANG	1. JAWA BARAT II	1. Bogor 2. Sukabumi 3. Cianjur 4. Bandung 5. Garut 6. Kuningan 7. Cirebon 8. Majalengka 9. Sumedang 10. Indramayu 11. Subang 12. Purwakarta 13. Karawang 14. Bekasi 15. Kota Bogor 16. Kota Sukabumi 17. Kota Bandung 18. Kota Cirebon 19. Kota Bekasi 20. Kota Depok 21. Kota Cimahi
		2. JAWA TENGAH III	1. Brebes 2. Tegal 3. Kota Tegal
III.	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	1. JAWA TENGAH II	1. Boyolali 2. Klaten 3. Sukoharjo 4. Wonogiri 5. Karanganyar 6. Sragen 7. Grobogan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			8. Blora
			9. Rembang
			10. Pati
			11. Kudus
			12. Jepara
			13. Demak
			14. Semarang
			15. Kendal
			16. Kota Surakarta
			17. Kota Salatiga
			18. Kota Semarang
		2. JAWA TIMUR II	1. Surabaya
			2. Trenggalek
			3. Tulung Agung
			4. Blitar
			5. Kediri
			6. Malang
			7. Lumajang
			8. Jember
			9. Banyuwangi
			10. Bondowoso
			11. Situbondo
			12. Probolinggo
			13. Pasuruan
			14. Sidoarjo
			15. Mojokerto
			16. Jombang
			17. Nganjuk
			18. Bangkalan
			19. Sampang
			20. Pamekasan
			21. Sumenep
			22. Kota Kediri
			23. Kota Blitar
			24. Kota Malang
			25. Kota Probolinggo
			26. Kota Pasuruan
			27. Kota Mojokerto
			28. Kota Surabaya
			29. Kota Batu
		3. KALIMANTAN TENGAH	1. Kotawaringin Barat
			2. Kotawaringin Timur
			3. Kapuas
			4. Barito Selatan
			5. Barito Timur
			6. Barito Utara
			7. Katingan
			8. Seruyan
			9. Sukamara
			10. Lamandau
			11. Gunung Mas
			12. Pulang Pisau
			13. Murungraya
			14. Kota Palangkaraya

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		4. KALIMANTAN SELATAN	1. Tanah Laut 2. Kota Baru 3. Banjar 4. Barito Kuala 5. Tapin 6. Hulu Sungai Selatan 7. Hulu Sungai Tengah 8. Hulu Sungai Utara 9. Tabalong 10. Tanah Bambu 11. Balangan 12. Kota Banjarmasin 13. Kota Banjarbaru
		5. KALIMANTAN TIMUR	1. Paser 2. Kutai Kertanegara 3. Berau 4. Bulungan 5. Nunukan 6. Malinau 7. Kutai Barat 8. Kutai Timur 9. Penajam Paser Utara 10. Kota Balikpapan 11. Kota Samarinda 12. Kota Tarakan 13. Kota Bontang
		6. BALI	1. Jembrana 2. Tabanan 3. Badung 4. Gianyar 5. Klungkung 6. Bangli 7. Karangasem 8. Buleleng 9. Kota Denpasar
		7. NUSA TENGGARA BARAT	1. Lombok Barat 2. Lombok Tengah 3. Lombok Timur 4. Sumbawa 5. Dompu 6. Bima 7. Sumbawa Barat 8. Kota Mataram 9. Kota Bima
		8. NUSA TENGGARA TIMUR	1. Kupang 2. Timur Tengah Selatan 3. Timur Tengah Utara 4. Belu

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			5. Alor
			6. Flores Timur
			7. Sikka
			8. Ende
			9. Ngada
			10. Manggarai
			11. Sumba Timur
			12. Sumba Barat
			13. Lembata
			14. Rotendao
			15. Manggarai Barat
			16. Kota Kupang
		9. SULAWESI UTARA	1. Bolang Mongondow
			2. Minahasa
			3. Kep. Sangihe
			4. Kep. Talaud
			5. Minahasa Selatan
			6. Minahasa Utara
			7. Kota Manado
			8. Kota Bitung
			9. Kota Tomohon
		10. SULAWESI TENGAH	1. Banggai
			2. Poso
			3. Donggala
			4. Toli-toli
			5. Buol
			6. Morowali
			7. Banggai Kepulauan
			8. Parigi Moutong
			9. Tojo Una Una
			10. Kota Palu
		11. SULAWESI SELATAN	1. Selayar
			2. Bulukumba
			3. Bantaeng
			4. Jeneponto
			5. Takalar
			6. Gowa
			7. Sinjai
			8. Bone
			9. Maros
			10. Pangke Jane Kepulauan
			11. Barru
			12. Soppeng
			13. Wajo
			14. Sidenreng Rapang
			15. Pinrang
			16. Enrekang
			17. Luwu
			18. Tana Toraja
			19. Polewali Mamasa
			20. Majene
			21. Mamuju
			22. Luwu Utara
			23. Mamasa
			24. Luwu Timur

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			25. Mamojo Utara
			26. Kota Makassar
			27. Kota Pare-pare
			28. Kota Palopo
		12. SULAWESI TENGGARA	1. Kolaka
			2. Konawe
			3. Muna
			4. Bulon
			5. Konawe Selatan
			6. Bombana
			7. Wakatobi
			8. Kolaka Utara
			9. Kota Kendari
			10. Kota Bau - Bau
		13. GORONTALO	1. Gorontalo
			2. Bualemo
			3. Kota Gorontalo
			4. Bone Boango
			5. Pohuwato
		14. SULAWESI BARAT	1. Mamuju Utara
			2. Mamuju
			3. Mamasa
			4. Polewali Mamasa
			5. Majene
		15. MALUKU	1. Maluku Tengah
			2. Maluku Tenggara
			3. Maluku Tenggara Barat
			4. Pulau Suru
			5. Seram Bagian Timur
			6. Seram Bagian Barat
			7. Kepulauan Aru
			8. Kota Ambon
		16. MALUKU UTARA	1. Halmahera Barat
			2. Halmahera Tengah
			3. Halmahera Utara
			4. Halmahera Selatan
			5. Kepulauan Sula
			6. Halmahera Timur
			7. Kota Ternate
			8. Kota Kep. Tidore
		17. PAPUA	1. Merauke
			2. Jayawijaya
			3. Jayapura
			4. Nabire
			5. Yapen Waropen
			6. Biak Nunfor
			7. Puncak Jaya
			8. Paniai
			9. Mimika
			10. Sarmi
			11. Keerom
			12. Pegunungan Bintang
			13. Yahukimo

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			14. Tolikara 15. Waropen 16. Bovenigoel 17. Mappi 18. Asmat 19. Supiori 20. Kota Jayapura
		18. IRIAN JAYA BARAT	1. Sorong 2. Manokwari 3. Fak - Fak 4. Sorong Selatan 5. Raja Ampat 6. Teluk Bentuni 7. Teluk Wondana 8. Kaimana 9. Kota Sorong
IV.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR I	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Madiun 4. Magetan 5. Ngawi 6. Bojonegoro 7. Tuban 8. Lamongan 9. Gresik 10. Kota Madiun

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
 DIREKTUR JENDERAL
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI



ARDIANSYAH PARMAN